**TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN LUKA BERAT DI
HUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006
TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

(Studi Putusan Nomor : 209/Pid.B/2021/PN.Kwg)

Fazri Maulana¹, Muhammad Gary Gagarin Akbar², Abdul Kholiq³

Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

¹hk18.fazrimaulana@mhs.ubpkarawang.ac.id

²gary.akbar@ubpkarawang.ac.id

³abdulkholiq@ubpkarawang.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Tinjauan viktimologi terhadap korban tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat. Viktimologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang korban dari berbagai aspek yang mencakup sebab timbulnya korban dan akibat timbulnya korban. Korban sendiri adalah pihak yang menderita secara jasmani dan rohani dan sebagai pihak yang paling dirugikan dari suatu tindak pidana. Dalam penelitian ini penulis memuat dua identifikasi masalah antara lain apa faktor penyebab tidak terpenuhinya hak korban tindak pidana penganiayaan serta bagaimana upaya perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penganiayaan dengan luka berat berdasarkan Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab tidak terpenuhinya hak korban tindak pidana penganiayaan serta upaya perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penganiayaan dengan luka berat berdasarkan Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Penulis menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan metode pendekatan Yuridis normatif. kesimpulan dari penulis ialah korban tidak mengetahui keberadaan lembaga perlindungan saksi dan korban begitupun jaksa penuntut umum tidak mengajukan tuntutan ganti rugi didalam tuntutan nya. Serta dengan adanya lembaga perlindungan saksi dan korban Negara telah mengupayakan perlindungan maksimal kepada korban tindak pidana.

Kata kunci : Viktimologi, Tindak Pidana Penganiayaan, Korban

ABSTRACT

This study discusses the victimization of victims of criminal acts of persecution that caused serious injuries. Victimology is the study of victims from various aspects, including the causes of victims and the consequences of victims. The victim himself is the party who suffers physically and spiritually and is the party most harmed by a crime. In this study, the authors identify two problems, including what are the factors causing the non-fulfillment of the rights of victims of criminal acts of persecution and how legal protection efforts are made for victims of criminal acts of persecution with serious injuries based on Law number 31 of 2014 on amendments to Law number 13 of 2006 regarding the protection of witnesses and victims. The purpose of this study was to determine the factors causing the non-fulfillment of the rights of victims of criminal acts of persecution as well as legal protection efforts for victims of criminal acts of persecution with serious injuries based on Law number 31 of 2014 on amendments to Law number 13 of 2006 concerning the protection of witnesses and victims. . The author uses a qualitative research method with a normative juridical approach. The conclusion from the author is that the victim did not know the existence of a witness protection institution and the victim as well as the public prosecutor did not file a claim for compensation in his claim. And with the existence of witness and victim protection institutions, the State has sought maximum protection for victims of criminal acts.

Keywords: Victimology, Crime of Persecution, Victims

TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (Studi Putusan Nomor : 209/Pid.B/2021/PN.Kwg) Fazri Maulana, Muhammad Gary Gagarin Akbar, Abdul Kholiq

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*) hal ini disebutkan dalam pasal 1 angka (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang rumusannya adalah negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Hukum di Indonesia sampai saat ini masih beraneka ragam (pluralistis) pandangan demikian tidak dapat disalahkan apalagi kita sebagai suatu bangsa sangat menjunjung tinggi Bhineka Tunggal Ika.² Hukum mempunyai pengertian yang luas. Setiap sudut dalam kehidupan ini pasti terkait dengan yang namanya hukum. Hukum merupakan sebuah sistem yang dibuat oleh manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar dapat bisa

terkontrol. Hukum juga merupakan alat yang dapat digunakan untuk menegakan dan mencari keadilan. Oleh sebab itu setiap masyarakat berhak untuk memperoleh pembelaan di depan hukum sehingga bisa diartikan hukum merupakan ketentuan atau peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi yang melanggarnya.³

Tindakan kejahatan menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang dalam kehidupan masyarakat berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik sering kali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban bahkan tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik atau bahkan sampai meninggal dunia. Selain itu tindakan penganiayaan tidak jarang meninggalkan

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3

² Dahlan Sinaga, *Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversi*, Nusa Media, Yogyakarta, 2017. Hlm 1

³

<https://www.temukanpengertian.com/2013/08/pengertian-hukum>. Diakses pada tanggal 20 Maret 2022 pukul 21.30 WIB.

TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (Studi Putusan Nomor : 209/Pid.B/2021/PN.Kwg) Fazri Maulana, Muhammad Gary Gagarin Akbar, Abdul Kholiq

efek atau dampak psikis pada si korban seperti trauma, ketakutan, ancaman bahkan ada juga korban penganiayaan yang mengalami gangguan mental.⁴ Penganiayaan merupakan perbuatan kejahatan, kejahatan terhadap manusia (*misdrifven tegen het lijf*) ini ditunjukkan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang menyebabkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) bahkan karena luka pada sebagian tubuh dapat menimbulkan kematian.⁵ Penganiayaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tepatnya pada Pasal 351 sampai dengan 358 penganiayaan terbagi menjadi dua yakni penganiayaan ringan dan penganiayaan berat. Penganiayaan berat berarti penganiayaan yang

mengakibatkan luka berat dan menurut KUHP diancam hukuman penjara maksimal lima tahun. Sebagaimana diterangkan Pasal 351 ayat (2) menyatakan “jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah diancam dengan pidana penjara maksimal lima tahun⁶”.

Tujuannya ialah tidak untuk menyanjung para korban tetapi untuk memberikan penjelasan mengenai peranan sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban. Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban seperti peranan korban pada saat terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peran korban dalam sistem peradilan pidana. Menurut J.E Sahetapy ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang dapat menjadi korban yang ditentukan oleh suatu *victimy* yang tidak selalu berhubungan

⁴ <https://www.gresnews.com/berita/tips/81865-mengenal-tindak-pidana-penganiayaan-berat/> diunduh 17 Mei 2022 pk. 22.00

⁵ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004, Hlm. 7

⁶ Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN LUKA BERAT DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (Studi Putusan Nomor : 209/Pid.B/2021/PN.Kwg) Fazri Maulana, Muhammad Gary Gagarin Akbar, Abdul Kholiq

dengan masalah kejahatan termasuk pula korban kecelakaan dan korban bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.⁷

Pengertian Viktimologi mengalami tiga fase perkembangan. Pada awalnya viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja pada fase ini dikatakan sebagai *penal or special victimology*. Pada fase kedua viktimologi tidak hanya mengkaji korban kejahatan saja tetapi meliputi korban kecelakaan pada fase ini disebut sebagai *General victimology*. Pada fase ketiga viktimologi berkembang lebih luas yakni mengkaji permasalahan korban dan penyalahgunaan kekuasaan dan Hak Asasi Manusia pada fase ini dikatakan sebagai *new victimology*.⁸

Indonesia memiliki lembaga dalam melindungi saksi dan korban yaitu LPSK atau dengan kata lain Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban serta perundang-undangan tersendiri untuk melindungi saksi dan korban yaitu Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Berdasarkan ketentuan umum tugas dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 1 angka 5. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau disingkat LPSK terkait tugas dan fungsinya dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban maka tugas yang paling utama dari LPSK ini adalah melindungi saksi dan korban dari

⁷ Rena Yulia *Op.Cit* Hlm. 44-45

⁸ Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hlm. 35

TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (Studi Putusan Nomor : 209/Pid.B/2021/PN.Kwg) Fazri Maulana, Muhammad Gary Gagarin Akbar, Abdul Kholiq

segala macam bentuk tekanan serta wajib memberikan hak-hak lainnya agar terciptanya penegakan hukum yang seadil-adilnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yakni metode yang bersifat bukan angka melainkan dengan uraian kalimat dengan beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut: Dalam menulis Skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif adapun alasan penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif ialah karena data yang digunakan merupakan data sekunder yakni dengan cara menelaah buku-buku, teori-teori, konsep-konsep, peraturan perundang-undangan, kasus yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas mengenai Tinjauan Viktimologi Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan Yang

Mengakibatkan Luka Berat Yang Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pendekatan ini juga dikenal dengan pendekatan kepastakaan.

PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Tidak Terpenuhinya Hak-Hak Korban Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Putusan Nomor : 209/Pid.B/2021/PN.Kwg

Viktimologi mencoba menjelaskan mengapa beberapa orang lebih mungkin menjadi korban kejahatan dibandingkan yang lainnya.. Menurut teori ini tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi, kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi dari korban.⁹

⁹ *ibid*

TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (Studi Putusan Nomor : 209/Pid.B/2021/PN.Kwg) *Fazri Maulana, Muhammad Gary Gagarin Akbar, Abdul Kholiq*

Korban kejahatan dapat hadir dalam proses peradilan pidana dengan dua kualitas berbeda pertama, korban hadir sebagai saksi. Disini fungsi korban untuk memberi kesaksian dalam rangka pengungkapan kejahatan yang sedang dalam proses pemeriksaan, baik pada tahap penyidikan, penuntutan maupun pada tahap pemeriksaan disidang pengadilan. Kedua korban hadir sebagai pihak yang dirugikan fungsi korban dalam hal ini yakni mengajukan tuntutan ganti kerugian terhadap pelaku kejahatan yang telah menimbulkan kerugian atau penderitaan terhadap korban. Perhatian terhadap kepentingan korban dapat dipandang sebagai unsur penting dalam rangka upaya penegakan hukum secara benar dan tepat, dalam hal ini fokus utamanya adalah pada perlakuan yang benar atau setepatnya terhadap pihak korban terutama ketentuan tentang penyediaan dan pemberian informasi yang dapat dimengerti

oleh pihak korban yang menderita akibat suatu tindak pidana oleh aparat penegak hukum serta Jaksa Penuntut Umum.

Dalam kasus pidana Jaksa Penuntut Umum hampir tidak pernah memberikan tuntutan ganti rugi dalam tuntutan pidananya. Langkanya pengajuan tuntutan jaksa dengan sanksi khusus pembayaran ganti rugi Seperti dalam putusan Nomor : 209/Pid.B/2021/PN.Kwg terdapat sebuah tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang memfokuskan kepada dasar tidak terpenuhinya hak korban tindak pidana. Adapun tuntutan yang dibuat oleh penuntut umum dalam perkara ini tidak terdapat perihal yang menyangkut pemenuhan hak-hak korban tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat seperti restitusi dan penggantian biaya pengobatan medis yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (Studi Putusan Nomor : 209/Pid.B/2021/PN.Kwg) *Fazri Maulana, Muhammad Gary Gagarin Akbar, Abdul Kholiq*

Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Salah satu dasar yang menjadi tidak terdapatnya sebuah pembahasan mengenai pemenuhan hak terhadap korban ialah tidak diajukannya oleh Penuntut Umum dalam Tuntutannya untuk dapat menjadi pertimbangan serta dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim agar korban mendapatkan pemenuhan hak-hak nya sebagai korban tindak pidana penganiayaan.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 6 ayat (1) mengemukakan bahwa korban pelanggaran Hak Asasi Manusia berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual dan korban tindak pidana penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 juga

berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Berdasarkan kronologi yang terjadi adanya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Latif Saepuloh Bin Nein terhadap korban yang bernama Irpan. Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi Eman Sulaiman Bin Encing lalu terdakwa bertanya keberadaan saksi Irpan kepada saksi Eman sambil terdakwa mengambil sebilah golok yang disimpan oleh terdakwa didalam baju yang dikenakan oleh terdakwa dan golok tersebut diambil dari gerobak tukang kelapa. Lalu tidak lama kemudian terdakwa melihat saksi Irpan yang turun dari sepeda motornya kemudian terdakwa langsung menghampiri saksi Irpan tanpa berkata-kata apapun terdakwa mengarahkan golok kearah saksi Irpan sebanyak Lima kali hingga mengenai kebagian pelipis sebelah kiri dan tangan kiri saksi Irpan, kemudian terdakwa

TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (Studi Putusan Nomor : 209/Pid.B/2021/PN.Kwg) *Fazri Maulana, Muhammad Gary Gagarin Akbar, Abdul Kholiq*

mengarahkan kembali golok yang masih dipegang ditangan kanan terdakwa sebanyak Tiga kali kearah badan saksi Irpan ada warga yang berusaha meleraikan perbuatan terdakwa tersebut hingga akhirnya terdakwa berhasil melarikan diri dan membuang golok disemak-semak halaman lapangan Bojong tugu.

Pasca kejadian Tindak pidana penganiayaan yang dialami oleh korban Irpan Supriatna Bin Winata yang membawa efek perubahan kepada korban. Walaupun korban dapat menyelamatkan diri dan menjauhi terdakwa tetapi korban mengalami luka robek pada bagian pelipis, tangan, badan serta korban harus dirawat selama dua bulan lamanya korban juga harus beristirahat dari pekerjaannya yang selama ini sebagai mata pencahariannya. Disisi lain menurut keterangan korban terdakwa tidak ada kata meminta maaf serta terdakupun tidak ada membantu biaya pengobatan

korban. Adapun dampak yang akan terjadi kepada korban akibat dari tindakan penganiayaan yang dialaminya antara lain, korban tidak akan merasa tenang dikarenakan korban akan lebih mewaspadaikan diri terhadap lingkungan guna menghindari kejadian yang pernah menimpa dirinya, korban akan sangat trauma akibat tindakan penganiayaan tersebut, rasa sakit terhadap tubuh yang dialami korban sehingga korban akan lebih sensitif.¹⁰

Penegak hukum dalam peradilan pidana pada kenyataannya sering tidak melihat bahwa dirinya mewakili korban. Hal ini terlihat dari proses penanganan yang hanya mengkondisikan korban hanya sebagai saksi tanpa mengkaji terlebih dahulu penderitaan yang dialami korban. Idealnya hak-hak korban diatur secara komperhensif dalam

¹⁰ Yoga Pramudyas Putra, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Pasal 351 Ayat (2) KUHP)*, Fakultas Hukum Universitas Bayangkara Surabaya. Hlm 4

TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (Studi Putusan Nomor : 209/Pid.B/2021/PN.Kwg) *Fazri Maulana, Muhammad Gary Gagarin Akbar, Abdul Kholiq*

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai acuan sentral dalam proses peradilan pidana namun kenyataannya hak korban tindak pidana seperti kompensasi dan restitusi diatur secara parsial yakni terpisah dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dengan demikian menjadi tantangan baru bagi pengimplementasikan hak-hak korban kejahatan. Lembaga-lembaga yang mewakili kewenangan dalam sistem peradilan pidana seperti kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri serta lembaga yang baru terbentuk seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Di dalam Pasal 7A ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan korban menyatakan : Dalam hal permohonan restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dapat mengajukan restitusi kepada penuntut umum agar dimuat dalamuntutannya.¹¹

Faktor Internal yang menjadi tidak terpenuhinya hak korban tindak pidana penganiayaan dalam putusan Nomor:209/Pid.B/2021/PN.Kwg menurut penulis korban tidak mengetahui adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dikarenakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban hanya berada di jakarta dan hanya mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan saja. Dalam hal ini menjadikan ketidak tahuan terhadap masyarakat khususnya yang menjadi korban tindak pidana akan keberadaan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Melihat situasi demikian sudah saatnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

¹¹ pasal 7A ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan korban

TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (Studi Putusan Nomor : 209/Pid.B/2021/PN.Kwg) Fazri Maulana, Muhammad Gary Gagarin Akbar, Abdul Kholiq

dibentuk disetiap provinsi dan kabupaten yang berada di Indonesia agar masyarakat umum mengetahui keberadaan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Menurut analisis penulis dalam permasalahan pertama ini ialah bahwa dalam tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak dimuat perihal hak-hak korban tindak pidana penganiayaan seperti restitusi dan penggantian biaya pengobatan medis serta menurut penulis pun korban tidak mengetahui bahwa korban tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat mempunyai hak yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang.

B. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Korban merupakan orang yang mengalami kerugian baik kerugian fisik mental maupun kerugian finansial yang merupakan akibat dari suatu tindak pidana atau merupakan salah satu faktor timbulnya tindak pidana. Korban juga diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat tindak pidana dan rasa keadilannya secara target atau sasaran tindak pidana. Dalam pengertian *legal definition of crime* definisi korban adalah sebagai penderitaan atau kerugian yang dialami orang atau sekelompok orang karena perbuatan jahat sebagaimana yang telah dirumuskan dan dapat di pidana dalam hukum pidana.¹² Definisi korban meliputi pula definisi *direct victims of crime* atau korban tindak pidana secara langsung dan *inderct victims of crime* atau korban tindak

¹² Maya Indah *Op.Cit.* Hlm. 27

TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (Studi Putusan Nomor : 209/Pid.B/2021/PN.Kwg) Fazri Maulana, Muhammad Gary Gagarin Akbar, Abdul Kholiq

pidana yang tidak langsung. Baik secara individu maupun secara kolektif yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun material serta mencangkup korban dan penyalahgunaan kekuasaan.

Korban secara langsung memiliki karakteristik sebagaimana korban adalah orang baik secara individu maupun secara kolektif, menderita kerugian termasuk luka fisik, luka mental, penderitaan emosional, kehilangan pendapatan, penindasan terhadap hak dasar manusia, disebabkan oleh adanya perbuatan atau kelalaian yang terumuskan dalam hukum pidana baik dalam taraf nasional maupun *local levels* dan disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan. Korban tidak langsung *indirect victims* yaitu korban dari turut campurnya seseorang dalam membentuk korban langsung atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban tetapi dia sendiri menjadi korban tindak kejahatan dalam hal ini merupakan

pihak ketiga atau mereka yang menggantungkan hidupnya kepada korban langsung.¹³

Mardjono Reksodiputro mengemukakan pandangan ada 4 macam pengertian korban korban kejahatan konvensional seperti korban pembunuhan, penganiayaan, pencurian dan lain sebagainya, korban kejahatan non konvensional seperti terorisme, pembajakan dan perdagangan narkoba, korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi seperti pelanggaran terhadap peraturan lingkungan dan penipuan konsumen, korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan umum seperti pelanggaran terhadap hak asasi manusia.¹⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang

¹³ *Ibid* Hlm 30-31

¹⁴ Marjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Indonesia, Jakarta 2007. Hlm. 86

TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (Studi Putusan Nomor : 209/Pid.B/2021/PN.Kwg) Fazri Maulana, Muhammad Gary Gagarin Akbar, Abdul Kholiq

Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa perlindungan adalah segala pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.¹⁵

Dalam peristiwa perkara pidana khususnya tindak pidana penganiayaan menjadi hal yang pasti bahwa terjadi suatu hubungan antara pelaku dan korban, korban tindak pidana penganiayaan menjadi korban *direct victims of crime* atau korban tindak pidana secara langsung yang menderita kerugian termasuk luka fisik, luka mental, penderitaan emosional, serta kehilangan pendapatan dan lain sebagainya. Disini korban tindak pidana penganiayaan menurut

penulis termasuk golongan korban lemah mental, fisik yang tidak dapat atau tidak berani melakukan perlawanan sebagai bentuk pembalasan yang memadai.

Korban tindak pidana penganiayaan menurut penulis jika dilihat berdasarkan kesalahannya yang dikemukakan oleh Mendelsohn ialah korban yang sama sekali tidak bersalah. Perlunya diberikan perlindungan hukum kepada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional tetapi juga didalam internasional. Dapat dilihat dari dibentuknya *declarasi of basic principal of justice for victims of crime and abuse of power* atau jika diartikan kedalam Bahasa Indonesia yang artinya Deklarasi Prinsip Keadilan Bagi Korban Kejahatan Dan Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai hasil dari *the seven united nation congress on the prevention of crime*

¹⁵ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada pasal 1 ayat (8)

TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (Studi Putusan Nomor : 209/Pid.B/2021/PN.Kwg) Fazri Maulana, Muhammad Gary Gagarin Akbar, Abdul Kholiq

and the treatment of offenders, yang berlangsung di Milan Italia September 1985

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan tentang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5 ayat (1) yang telah sebutkan. Saksi atau korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi beserta keluarga dan harta bendanya pun harus aman dari kesaksian yang sudah diberikannya merupakan perlindungan yang utama kepada saksi dan korban karena itu apabila diperlukan saksi dan korban dapat ditempatkan disuatu lokasi yang dirahaskan dari siapapun dan sering disebut sebagai rumah aman. Korban harus ikut serta untuk memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan keamanan yang akan diberikan kepadanya. Korban atau saksi harus memberikan keterangan yang sebenarnya tanpa adanya tekanan dari pihak

manapun. Saksi dan korban mendapatkan hak untuk didampingi seorang penerjemah hal ini khusus diberikan kepada saksi dan korban yang tidak lancar Bahasa Indonesia. Korban atau saksi pun dibebaskan dari pertanyaan yang menjerat kepada mereka.

Saksi dan korban berhak mendapatkan hak mengenai perkembangan kasus hal ini dikarenakan sering kali saksi dan korban hanya diminta keterangan. Dalam Undang-Undang ini pun diatur hak saksi dan korban untuk mengetahui putusan pengadilan hak ini bertujuan sebagai penghargaan atas kesediaan saksi dan korban dalam berperan aktif demi kelancaran persidangan. Saksi dan korban mendapatkan hak untuk mendapatkan informasi dalam hal terpidana dibebaskan hal ini bertujuan agar saksi dan korban merasa tenang dan dapat mempersiapkan diri karena dikawatirkan terpidana melakukan aksi balas dendam.

TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (Studi Putusan Nomor : 209/Pid.B/2021/PN.Kwg) *Fazri Maulana, Muhammad Gary Gagarin Akbar, Abdul Kholiq*

Korban dan saksi berhak memperoleh penggantian biaya transportasi bantuan biaya transportasi ini diberikan dalam rangka memperlancar saksi dan korban untuk datang ke lokasi tempat dimana mereka akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Korban berhak mendapatkan penasihat hukum yakni seseorang yang memberikan jasa hukum baik berupa persekutuan maupun individu. Sedangkan saksi dan korban memperoleh hak untuk mendapatkan bantuan hidup diperuntukan kepada saksi dan korban yang membutuhkan namun sifatnya hanya sementara saja misalkan biaya makan sehari-hari. Korban dan saksi mempunyai hak untuk mendapatkan pendampingan dari kuasa hukumnya.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada pasal 6 ayat 1

mengemukakan Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual dan korban tindak pidana penganiayaan berat selain berhak sebagaimana dimaksud pasal 5 juga berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.¹⁶

Ketentuan pasal tersebut bahwa mereka yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana yang telah dijabarkan diatas korban berhak mendapatkan bantuan medis atas kerugian imateril yang ia derita akibat terjadinya suatu tindak pidana yang dialaminya dan korban berhak rehabilitasi psikososial dan psikologis untuk memulihkan kembali trauma yang dialami korban sehingga korban tidak merasa

¹⁶ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada pasal 6 ayat 1

TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (Studi Putusan Nomor : 209/Pid.B/2021/PN.Kwg) *Fazri Maulana, Muhammad Gary Gagarin Akbar, Abdul Kholiq*

depresi akibat kejadian tindak pidana yang menimpa kepada dirinya.

Perlindungan terhadap saksi dan korban memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana sehingga dengan keterangan saksi dan korban yang diberikan secara bebas dari rasa takut dan ancaman dapat mengungkap suatu tindak pidana. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada pasal 1 ayat (10) menyatakan bahwa Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya.¹⁷

Disini yang dimaksud dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun

¹⁷ pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Undang-Undang perlindungan Saksi dan Korban hanya korban Hak Asasi Manusia yang berat dan korban tindak pidana terorisme saja yang mendapatkan kompensasi sementara korban tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat tidak termasuk untuk mendapatkan kompensasi. Dimana pengertian kompensasi menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan korban ialah kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya.

Menurut penulis korban tindak pidana penganiayaan yang menyabkan luka berat bagi si korban seharusnya mendapatkan kompensasi dikarenakan disini korban yang menderita langsung akibat tindakan pelaku baik yang menyebabkan kurigan materil

TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (Studi Putusan Nomor : 209/Pid.B/2021/PN.Kwg) *Fazri Maulana, Muhammad Gary Gagarin Akbar, Abdul Kholiq*

dikarenakan korban penganiayaan tidak dapat bekerja dan kehilangan mata pencaharian serta kerugian imateril karena luka-luka berat yang diderita si korban atas tindakan pelaku. Karena kompensasi negara yang ikut andil memberikan santunan berupa kompensasi apabila pelaku tidak mampu.

Berbeda halnya dengan kompensasi restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita oleh korban. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada pasal 1 ayat (11) mengemukakan bahwa restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

Bentuk restitusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 *juncto* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dapat ganti kerugian materil maupun imateril akibat suatu tindak pidana yang menimpa korban, serta kurigan lainnya yang diderita korban akibat suatu tindak pidana termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara atau biaya lainnya yang berhubungan dengan proses hukum. Sementara itu didalam pasal 7A ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban menyebutkan bahwa Tindak pidana sebagai dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Berarti dalam pasal 7A ayat (2) tersebut agar memperoleh perlindungan hukum berupa restitusi korban

TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (Studi Putusan Nomor : 209/Pid.B/2021/PN.Kwg) *Fazri Maulana, Muhammad Gary Gagarin Akbar, Abdul Kholiq*

harus mengajukan permohonan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Tata cara memperoleh perlindungan diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa:¹⁸ Tata cara memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

Analisis pada permasalahan kedua dalam penelitian ini adalah dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pemerintah telah mengupayakan perlindungan maksimal kepada saksi dan korban tindak pidana yakni dengan memberikan perlindungan terhadap mereka yang menjadi saksi dan korban

tindak pidana serta untuk menjamin keamanan korban tindak pidana, memfasilitasi dan memberikan pelayanan terhadap korban berupa pemenuhan hak prosedural, perlindungan fisik, bantuan medis atau psikologis serta kompensasi dan restitusi. Walaupun Upaya perlindungan tersebut berdasarkan ketentuan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

PENUTUP

Kesimpulan

Faktor penyebab tidak terpenuhinya hak korban tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat ada dua faktor yakni Faktor internal dan Faktor eksternal. Faktor internal yang menjadi tidak terpenuhinya hak korban tindak pidana penganiayaan menurut penulis korban tidak mengetahui adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dikarenakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban hanya berada di Jakarta dan hanya mempunyai

¹⁸ pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (Studi Putusan Nomor : 209/Pid.B/2021/PN.Kwg) Fazri Maulana, Muhammad Gary Gagarin Akbar, Abdul Kholiq

perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan saja. Dalam hal ini menjadikan ketidak tahuan terhadap masyarakat khususnya yang menjadi korban tindak pidana akan keberadaan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sementara itu faktor eksternal yang menjadikan tidak terpenuhinya hak korban tindak pidana penganiayaan yakni jaksa penuntut umum tidak mengajukan tuntutan ganti rugi didalam tuntutan nya.

Upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana khususnya tindak pidana penganiayaan pemerintah telah mengupayakan perlindungan yang maksimal dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yakni dengan terbentuknya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, korban tindak pidana dijamin keamanannya,

Lembaga ini juga memfasilitasi dan memberikan pelayanan terhadap korban berupa pemenuhan hak prosedural, perlindungan fisik, bantuan medis atau psikologis seta kompensasi dan restitusi. Semua itu dengan ketentuan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004.

_____, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002.

Amara Paripurna, Astutik, Prilian Cahyani, Riza Alifianto, *Viktimologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2021.

Andi Hamzah *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia*, Pradya Paramita, Jakarta 1993.

TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (Studi Putusan Nomor : 209/Pid.B/2021/PN.Kwg) Fazri Maulana, Muhammad Gary Gagarin Akbar, Abdul Kholiq

Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan,*

Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.

Bambang Waluyo, *viktimologi perlindungan*

korban dan saksi, Sinar Grafika,

Jakarta 2011.

Dahlan Sinaga, *Penegakan Hukum dengan*

Pendekatan Diversi, Nusa Media,

Yogyakarta, 2017.

Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom,

Urgensi Perlindungan Korban

Kejahatan Antara Norma dan

Realita, Raja Grafindo Persada,

Jakarta, 2008.

G. Widiartana, *Viktimologi perspektif*

Korban Dalam Penanggulannya,

Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.

_____ *Viktimologi Perspektif Korban*

Dalam Penanggulangan Kejahatan,

Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta,

2014.

Ishaq, *Hukum Pidana,* Pt Raja Grafindo

Persada, Depok, 2020.

B. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

Tahun 2022 tentang Tata Cara

Penyelesaian Permohonan dan

Pemberian Restitusi dan Kompensasi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

Atas Perubahan Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2006 Tentang

Perlindungan saksi dan korban

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

C. Sumber lainnya

Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan,*

Universitas Trisakti, Jakarta, 2009.

Bedi Setiawan Al Fahmi *Perlindungan*

Korban Tindak Pidana Perkosaan

Dalam Proses Peradilan Pidana

Perspektif Pembaharuan Hukum

Pidana Indonesia, Jurnal Hukum dan

Pembangunan, Fakultas Hukum

Depok 2009.

TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (Studi Putusan Nomor : 209/Pid.B/2021/PN.Kwg) Fazri Maulana, Muhammad Gary Gagarin Akbar, Abdul Kholiq

<https://www.info-hukum.com> (diunduh 18 mei 2022 Pkl. 03.00 WIB)

<http://repository.uma.ac.id/bitstream>

(diunduh 18 mei 2022 Pkl. 03.40)

<https://www.gresnews.com/berita/tips/81865>

[-mengetahui-tindak-pidana-](#)

[penganiayaan-berat/](#) (diunduh 17

Mei 2022 pkl. 22.00)

<https://www.temukanpengertian.com/2013/0>

[8/pengertian-hukum.](#) (diunduh 20

Mei 2022 pkl. 21.30)

<https://www.erisamdyprayatna.com/2020/12/tindak-pidana-penganiayaan.html> Di

unduh (6 juli 2022 Pkl. 21.00 WIB)

Studi Putusan Nomor :

209/Pid.B/2021/PN.Kwg

Yoga Pramudyas Putra, *Perlindungan*

Hukum Terhadap Korban

Penganiayaan Yang Mengakibatkan

Luka Berat (Studi Pasal 351 Ayat (2)

KUHP), Fakultas Hukum Universitas

Bayangkara Surabaya.